

PEMBERITAAN MEDIA

**EDISI
2 - 8 Maret 2020**

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Perubahan Iklim

Inggris Didesak Cepat Untuk Mengurangi Emisi Karbon

60 kelompok lingkungan dan pembangunan internasional, termasuk Oxfam, Greenpeace, ShareAction, dan World Wildlife Fund meminta mendesak Perdana Menteri Inggris untuk menggunakan kebijakan cepat mengurangi emisi karbon. Sehingga, Inggris dapat memimpin dengan contoh terdepan ketika menjadi tuan rumah KTT iklim di Glasgow pada November 2020.

Meskipun Inggris adalah negara G7 pertama yang mengadopsi target mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi CO2 menjadi nol pada 2050, namun komitmen tersebut harus disertai keseriusan pemerintah.

Inggris Didesak Cepat Untuk Mengurangi Emisi Karbon

Perlu menetapkan prioritas dalam "Rencana Aksi Glasgow" mencakup Inggris yang meluncurkan rencana dekarbonisasi yang lebih ambisius dan terperinci menjelang KTT.

Mendesak Inggris menghentikan pembiayaan proyek bahan bakar fosil di luar negeri, dan memimpin upaya internasional untuk meningkatkan bantuan bagi negara-negara yang dilanda bencana iklim.

Inggris harus meningkatkan dukungan "solusi berbasis alam", memanfaatkan proses di tanah, hutan, padang rumput, lahan gambut, hutan bakau atau ekosistem lain untuk menyerap dan menyimpan sejumlah besar karbon.

Inggris Didesak Cepat Untuk Mengurangi Emisi Karbon

Menjelang persiapan COP Glasgow, Inggris memecat mantan Menteri Energi Claire O'Neill sebagai presiden KTT. Ini mendorong O'Neil menulis surat berisi kritikan pedas yang mengatakan janji tindakan pemerintah yang hampir tidak terpenuhi.

Menteri Bisnis Inggris Alok Sharma mengambil alih sebagai presiden KTT. Pada pekan lalu ia menyerukan negara-negara untuk meningkatkan momentum menuju ekonomi tanpa karbon di Glasgow dengan melakukan kebijakan untuk pengurangan lebih lanjut yang signifikan dalam emisi CO2 pada 2030.

Inggris Didesak Cepat Untuk Mengurangi Emisi Karbon

Inggris sebagai tuan rumah seharusnya memimpin dalam membujuk negara-negara berpolusi besar mengumumkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi menjelang pertemuan.

Untuk bagiannya, Inggris dapat menunjukkan kemajuan dalam mengurangi emisi dari sektor kekuatan dengan beralih ke energi terbarukan. Meski Inggris hanya membuat sedikit kemajuan dalam membersihkan pemanasan, transportasi, pertanian, dan industri.

Sudah saatnya Indonesia mengembangkan energi terbarukan

Arifin Tasrif, Menteri ESDM

- ❑ Sudah saatnya Indonesia mengembangkan energi terbarukan yang memanfaatkan energi dari tumbuhan, air, udara, serta matahari, untuk memperbaiki lingkungan hidup, dan menekan tingkat emisi.
- ❑ Indonesia memiliki potensi tenaga bio, yang bisa digunakan sebagai peluang mengembangkan energi terbarukan.
- ❑ Untuk pengembangan sektor energi terbarukan, pada 2024 hingga 2025 terdapat peluang investasi hampir USD 25 miliar.
- ❑ Inovasi ketahanan energi nasional dapat ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan impor BBM serta biaya logistik lainnya.

Emisi Karbon Jakarta Tertinggi di Asia Tenggara

Jakarta kadar emisi karbonnya sudah di atas 40 persen.

*"Di ASEAN, Jakarta paling tinggi (emisi karbon). Maka dari itu memang energi dari matahari betul-betul kita galakkan dan intensifkan,"
Arifin Tasrif, Menteri ESDM dalam Jakarta Energy Forum 2020*

Kebakaran Hutan dan Lahan

Rapat Terbatas Pencegahan Karhutla di Provinsi Riau

Rapat Terbatas pada 7 Maret 2020 membahas Pencegahan Karhutla di Provinsi Riau tahun 2020

Dihadiri Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Kepala Badan BRG Nazir Foed, Kepala BPBD Edwar Sanger, Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono, Kapolda Riau, serta Kepala OPD Pemprov Riau lainnya.

Pemprov Riau telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 11 Februari hingga 31 Oktober 2020 mendatang.

Penetapan status siaga ini bertujuan untuk mempercepat gerak tim Karhutla dan mempercepat datangnya bantuan dari pusat.

Perkiraan BMKG, Riau akan mengalami kemarau panjang, ditambah lagi Riau termasuk daerah yang sebagian besar lahannya gambut membuat Riau semakin rawan Karhutla.

Rapat Terbatas Pencegahan Karhutla di Provinsi Riau

Rapat Terbatas pada 7
Maret 2020 membahas
Pencegahan Karhutla
di Provinsi Riau tahun
2020

Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK

KLHK akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam membentuk tapak-tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di sejumlah titik rawan. KPH adalah unit terkecil pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, di Riau terdapat sebanyak 13 KPH.

“Selaku pengelola di tingkat tapak, KPH berkewajiban mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai fungsinya dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta lingkungan setempat. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang juga menjadi perhatian kita, diharapkan dapat membentuk tapak-tapak KPH dimaksud”

Bambang Hendroyono, Sekjen KLHK

Rapat Terbatas KLHK bersama Gubernur Riau dan Forkopimda Riau

Rapat Terbatas pada 7
Maret 2020 membahas
Pencegahan Karhutla
di Provinsi Riau tahun
2020

Gubernur Riau Syamsuar menyambut baik dan Pemprov Riau siap membentuk sekaligus membina tapak-tapak KPH di sejumlah lokasi yang selalu menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan.

Nantinya tapak KPH akan menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dinas terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan unsur masyarakat.

Titik tapak KPH juga harus memperhatikan lokasi wilayah perbatasan di bagian pesisir utara Riau yang menghadap Singapura dan Malaysia, seperti di Bengkalis, Rupat, Dumai, Rangsang (Kepulauan Meranti).

Karhutla di Meranti, Riau

Karhutla di Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berhasil dipadamkan setelah empat hari berlangsung.

Luasnya mencapai 50 hektar lahan gambut. Areal yang terbakar merupakan lahan tidur milik masyarakat yang tumbuh semak belukar dan tanaman liar.

Kedalaman gambut di Pulau Muda mencapai satu sampai lima meter.

Bengkalis siaga antisipasi karhutla hingga Juli 2020

Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan sejak 22 Januari hingga 31 Juli 2020.

Penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan selama 192 hari dilakukan karena wilayah Bengkalis rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Sepanjang 2019 Kabupaten Bengkalis menghadapi 192 kasus kebakaran hutan dan lahan yang mencakup area seluas 1.375 hektare.

Sepanjang Januari sampai Februari 2020 kebakaran hutan dan lahan meliputi area seluas 76 hektare di Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis siaga antisipasi karhutla hingga Juli 2020

Menurut prakiraan BMKG musim kemarau 2020 berlangsung dari Februari sampai Oktober dan mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan membakar guna menghindari kejadian kebakaran hutan dan lahan selama kemarau.

Pemerintah Provinsi Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dari 11 Februari sampai 31 Oktober 2020.

Karhutla di Bengkalis, Riau Semakin Meluas

Hingga 3 Maret 2020, telah terjadi karhutla di 16 lokasi di Kabupaten Bengkalis, dan terbanyak di Pulau Rupat ada 6 lokasi kebakaran.

Lokasi lain terletak di Kecamatan Bantan, Kecamatan Talang Muandau, Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, dan juga ada di Kecamatan Siakkecil.

Karhutla di Bengkalis, Riau Semakin Meluas

Selain itu, 6 kecamatan telah dilanda karhutla, yaitu Kecamatan Rupal Utara, Rupal, Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Bukit Batu, Bathin Solapan, Mandau dan Tualang Mandau

Di Kecamatan Rupal dan Rupal Utara, merupakan wilayah yang paling luas dilanda Karhutla, diperkirakan puluhan hektar lahan terbakar.

Untuk wilayah Karhutla yang terjadi di Kecamatan Bengkalis merupakan lahan tidur milik Negara dan lahan milik PT MAS (kelapa sawit).

20 Hektar Lahan Gambut di Siak, Riau Terbakar

Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Siak, Provinsi Riau terjadi di lahan seluas 20 hektar, di Dusun Air Jambai, Kampung Jambai Makmur, Kabupaten Siak.

Di dalamnya terdapat pekebunan kelapa sawit milik PT Berlian Mitra Inti (BMI)

Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman 2 meter. Pada lahan itu ada kelapa sawit yang berumur 12 tahun. Sebagian kecilnya juga ada semak belukar.

Tim pemadaman cukup kewalahan karena cuaca panas, angin kencang, membuat api mudah membesar. Sementara itu, petugas juga kesulitan untuk mendapatkan pasokan air.

Polri Tetapkan 44 Tersangka Karhutla

Brigjen Argo Yuwono, Karo Penmas Mabes Polri

- ❑ 44 orang ditetapkan sebagai tersangka Karhutla selama Januari-Februari 2020. Jumlah lahan yang terbakar ada 179,4 ha.
- ❑ Mereka terancam hukuman penjara 12 tahun dan denda hingga Rp 10 miliar. Mereka dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 187, 188 KUHP Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 108 UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
- ❑ Selama dua bulan terakhir, Polri menerima 37 laporan kasus karhutla di sejumlah daerah seperti Rohan Hilir, Bengkalis, Siak, Dumai, Meranti, dan Pekanbaru. Dari 37 laporan itu, sebanyak 24 kasus sudah di tahap penyidikan dan 13 lainnya masuk pemberkasan di Kejaksaan Tinggi.

"Grand design" upaya pencegahan karhutla belum optimal

Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian

Upaya pencegahan karhutla menggunakan grand design atau desain utama sebagai dasar kebijakan masih belum berjalan optimal karena kementerian dan lembaga yang tidak menggunakan usulan kebijakan tersebut dalam membuat anggaran

"'Grand design' sudah kita tetapkan tetapi tidak pernah dijadikan referensi oleh kementerian dan lembaga dalam pengusulan anggaran. Sehingga kita lihat alokasi anggaran di masing-masing kementerian untuk upaya pencegahan kita rasakan masih belum optimal,"

*Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola
Kehutanan Kemenko Perekonomian*

"Grand design" upaya pencegahan karhutla belum optimal

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah merancang grand design pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan 2017-2019 sebagai usulan dasar kebijakan setelah karhutla pada 2015.

Saat itu, tujuan dari rancangan itu adalah untuk menurunkan tingkat karhutla secara signifikan dari terukur dari tahun ke tahun, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antar kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan partisipasi sektor swasta dan sipil dalam upaya pencegahan karhutla.

"Grand design" upaya pencegahan karhutla belum optimal

Tapi, kementerian serta lembaga terkait belum mengajukan anggaran dengan menggunakan grand design yang sudah disepakati itu.

Saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk membuat grand design baru untuk periode tiga tahun ke depan, meski luasan kebakaran kembali meningkat pada 2019 setelah turun beberapa tahun sebelumnya.

Hutan Adat

Hutan Adat di Kabupaten Kampar, Riau

Pemerintah telah menetapkan 2 hutan adat di Kampar pada 21 Februari 2020 lalu, yaitu :

- ❑ Hutan Adat Imbo Putui Kenegerian Petapahan dengan luas 251 hektare
- ❑ Hutan Adat Kenegerian Kampa seluas 156,8 hektare.

Untuk hutan adat Kenegerian Kampa ini terbagi dalam dua hamparan, masing-masing diberikan nama Ghimbo Lidah dan Ghimbo Pomuan.

Dari hasil penelitian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), sedikitnya ada 308 komunitas masyarakat adat dari 12 kabupaten/kota di Riau.

Hutan Adat di Kabupaten Kampar, Riau

Di Kampar juga ada perda tentang ulayat nomor 11 tahun 1999

Kabupaten Kampar setidaknya ada delapan kawasan yang masuk dalam kawasan hutan adat. Namun sejauh ini baru tujuh kawasan hutan adat yang sudah diajukan penerbitan SK-nya ke Kementerian LHK.

Dari tujuh usulan SK hutan adat tersebut baru dua yang sudah diterbitkan pemerintah. Sedangkan yang lima usulan lagi masih terus berposes.

Masih diperlukan peraturan daerah yang mengatur soal penetapan kawasan hutan adat tersebut.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Empat Desa di Kabupaten Nunukan Dapat SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Bupati Nunukan secara resmi menyerahkan SK MHA kepada 4 wilayah hukum adat.

Kempat masyarakat adat yang menerima SK Pengakuan HMA, yaitu :

- ❑ MHA Tidung Pagun Pelaju di Desa Pelaju Kecamatan Sembakung,
- ❑ MHA Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon di Desa Tujung Kecamatan Sembakung,
- ❑ MHA Dayak Agabag Pagun Nansiung Nangkoyob di Desa Kekayap Kecamatan Sebuku
- ❑ MHA Dayak Agabag Pagun Obolan Tompokon Kecamatan Lumbis Ogong.

Empat Desa di Kabupaten Nunukan Dapat SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan terkait masyarakat Hukum Adat, maka akan menjamin empat desa akan terlindungi dan memiliki kekuatan hukum.

Selain itu, dengan terbitnya SK tersebut pemerintah daerah lebih memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Nunukan.

Mengingat masyarakat hukum adat banyak yang tinggal di wilayah perbatasan.

SK pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) sebagai langka pemerintah memproteksi masyarakat ada yang ada di desa-desa.

Sebenarnya, ada enam masyarakat adat yang saat ini mengajukan untuk mendapatkan pengakuan. Namun baru empat masyarakat adat yang sudah diproses dan mendapatkan pengakuan melakukan SK Bupati.

Sumber Pemberitaan

- <https://www.antaranews.com/berita/1342126/di-lokasi-rawan-karhutla-riau-klhk-bentuk-kph>
- <http://www.inhilklik.com/news/detail/36924/lingkungan/karhutla-di-bengkalis-semakin-meluas>
- <https://www.gatra.com/detail/news/471193/keberencanaan/-20-hektar-lahan-gambut-di-siak-terbakar>
- <https://manado.tribunnews.com/2020/03/06/soal-kasus-kebakaran-hutan-dan-lahan-sepanjang-januari-februari-2020-polri-tetapkan-44-tersangka>
- <https://internasional.republika.co.id/berita/q6jl9m382/perdana-menteri-inggris-didesak-cepat-kurangi-emisi-karbon>
- <https://www.merdeka.com/uang/menteri-arifin-emisi-karbon-jakarta-tertinggi-di-asia-tenggara.html>
- <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/02/03/2020/menteri-esdm-emisi-karbon-di-jakarta-40-persen-bisa-ganggu-kesehatan/>
- <http://korankaltara.com/masyarakat-hukum-adat-di-nunukan-terima-sk-pengakuan/>
- <http://www.metrokaltara.com/bupati-serahkan-sk-pengakuan-masyarakat-hukum-adat/020/225681/308-komunitas-adat-riau-teridentifikasi.html>
- <https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/03/05/penanganan-karhutla-di-riau-kapolres-api-lahap-50-hektar-lahan-gambut-di-pulau-muda-dalam-4-hari?page=2>
- <https://www.riaueditor.com/view/Pemerintahan/66130/Bahas-Karhutla--Gubri-Gelar-Rapat-Terbatas-Bersama-KLHK.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/1335678/karhutla-landa-sejumlah-kecamatan-di-kabupaten-bengkalis>
- <https://www.antaranews.com/berita/1334826/grand-design-upaya-pencegahan-karhutla-dianggap-belum-optimal>
- <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/02/03/2020/225681/308-komunitas-adat-riau-teridentifikasi.html>
- <https://www.antaranews.com/berita/1330166/bengkalis-siaga-antisipasi-kebakaran-hutan-lahan-hingga-juli-2020>
- <http://benuanta.co.id/2020/03/05/sk-bupati-tentang-hukum-adat-masyarakat-jadi-terlindungi/45863/14/58/44/>
- <http://korankaltara.com/pengakuan-adat-bukan-hambatan-investasi/>



LULUK'S UPDATE

EDISI
Minggu 11 Maret 2020

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Madani